

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Mengingat sektor UMKM merupakan motor penggerak perekonomian dan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu strategi peningkatan kapasitas sektor UMKM. Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesempatan kerja (Fitriani et al., 2021). Pada kenyataannya, Poin kuncinya adalah kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan cepat atau permanen tetapi harus dikurangi secara bertahap dan berkelanjutan dengan kerjasama di semua tingkatan, mulai di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional (Amelia & Zakik, 2023). Salah satu cara mengurangi kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM. UMKM berperan penting dalam perkembangan dan pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti ketika krisis melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997, UMKM yang pada masa itu masih disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa sebab mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Kadju & Bendesa, 2017).

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumberdaya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Keberadaan

UMKM dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena keberadaannya mampu menyediakan banyak kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi, serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah (Euis, 2017).

Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang (Anastasya, 2023). Sebagai entitas bisnis yang menopang perekonomian Indonesia, jumlah UMKM alami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 Jumlah Industri Skala Mikro di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Usaha Mikro
2019	4.127.108
2020	3.909.718
2021	3.956.083
2022	4.122.869
2023	4.181.128

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setiap tahun jumlah UMKM mengalami fluktuatif jumlahnya. Sebagai catatan, jumlah UMKM yang tertera pada data tersebut berupa estimasi, jadi tidak mencerminkan jumlah UMKM yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM sangatlah banyak dan sebagian besar belum melakukan registrasi usaha sehingga sulit untuk didata (Anastasya, 2023).

Dalam jumlah pertumbuhan UMKM di Indonesia tersebut, Jawa Timur juga termasuk mengalami pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur kuartal ke kuartal tertinggi di antara provinsi se-Jawa bahkan lebih tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyumbang 58,36 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi setempat pada tahun 2022. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi *backbone* atau tulang punggung bagi perekonomian Jawa Timur.

Pertumbuhan angka UMKM tidak hanya terjadi di wilayah luas seperti di Indonesia atau di Jawa Timur, namun di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami pertumbuhan UMKM. UMKM yang telah tersebar luas di tengah kehidupan masyarakat Bojonegoro merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi, mengingat besarnya peranan yang ditunjukkan dengan keberadaan usaha ini maka harus selalu diupayakan adanya pembinaan dan pengembangan yang bertujuan agar setiap usaha jenis ini mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan berkembang ke arah yang lebih baik, maju dan mandiri sehingga perannya dalam perekonomian semakin besar. Di kabupaten Bojonegoro dapat dijumpai keberadaan berbagai jenis usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di sentra-sentra industri. Perkembangan jumlah usaha mikro menunjukkan tren yang cukup baik (Dinas Penanaman Modal, 2023).

Meskipun UMKM mengalami pertumbuhan namun belum tentu UMKM tidak memiliki masalah pada usahanya, kebanyakan usaha kecil tidak memiliki strategi atau kekurangan ahli strategi. Hal ini yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Kinerja UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama dan mendasar yakni faktor eksternal dan faktor internal. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan dan

memperluas UMKM dalam perekonomian nasional diperlukan serangkaian pembinaan yang bersumber pada masalah keterbatasan teknologi, informasi dan permodalan. Keberhasilan UMKM ditentukan oleh kepribadian yang dimiliki oleh para pengusaha dan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.

Rothwel (1982) menguraikan beberapa kebijakan umum yang mendukung UMKM, diantaranya adalah distribusi dari kekuatan pasar, tingkat konsentrasi pasar yang tinggi mengakibatkan ekonomi tidak efisien, UMKM berfungsi sebagai suatu peredam terhadap guncangan kesempatan kerja, UMKM mampu menghasilkan produk yang bervariasi. Melihat berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi oleh UMKM maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjamin Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM.

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas Program kredit, dimana program ini sama seperti Program KUR. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti efektif dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia. Program ini memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah, yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Studi menunjukkan bahwa penerima KUR mengalami peningkatan pendapatan, terutama setelah memperoleh modal tambahan untuk memperluas usaha mereka (Anisa et al., 2023). Selain itu, KUR juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal distribusi kredit yang merata di berbagai daerah (Meby & Latif, 2015)

Sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, UMKM di Bojonegoro terdapat keterbatasan dalam perkembangannya. Menurut observasi peneliti keterbatasannya antara lain lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran. Kurangnya kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku UMKM sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini. Wujud solusi ini adalah pemberian program pembiayaan bagi UMKM sebagai sumber modal dalam menjalankan aktivitas usaha maupun pengembangannya (Ismanto, 2014).

Solusi dari permasalahan UMKM yang terhambat permodalan yaitu pemberian program pembiayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki salah satu program untuk menyejahterakan para pedagang melalui bantuan kredit yang bunganya telah disubsidi oleh pemerintah. Program yang diberikan pemerintah untuk pelaku UMKM merupakan program Kartu Pedagang Produktif (KPP). Program Kartu Pedagang Produktif disalurkan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang kiranya memerlukan dana modal tambahan bagi usaha yang sedang dijalankan. Ketika program sudah disalurkan melalui pemberian pinjaman lunak kepada pelaku UMKM diharapkan mampu membantu mengembangkan usaha pelaku UMKM.

Program Kartu Pedagang Produktif merupakan bantuan pinjaman lunak sebagai akses kredit yang bunganya telah disubsidi pemerintah. Untuk subsidi

bunga kredit, Pemerintah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran Pinjaman Rp 0 sampai Rp 5 juta, bunga 3% disubsidi oleh Pemerintah 3%. Besaran Pinjaman Rp 5 juta sampai Rp 25 juta, bunga 6% disubsidi oleh Pemerintah 6%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro diarahkan untuk prioritas percepatan pembangunan sektor-sektor ekonomi berkelanjutan, seperti sektor jasa, hilirisasi, sektor pertanian, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga industri padat karya. Termasuk juga peningkatan sumber daya manusia serta percepatan pengentasan kemiskinan di daerah (Kantor PRC, 2023).

Program Kartu Pedagang Produktif merupakan salah satu program yang dibawah kepemimpinan Bupati dan program Kartu Pedagang Produktif ini berjalan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendukung program Kartu Pedagang Produktif, PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro ditunjuk sebagai Bank pelaksana atau sebagai penyaluran bantuan modal. Modal kredit untuk kredit Kartu Pedagang Produktif merupakan dari dana pihak ketiga, yaitu dana berupa tabungan, giro dan deposito. Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Simpanan masyarakat tersebut, bank memberikan imbalan berupa bunga. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan Program KPP pada tahun 2019. Sasaran Utama dari program KPP yaitu para usaha mikro. Berikut tabel jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada tahun 2019-2023.

Kartu Pedagang Produktif memiliki hubungan erat dengan pengembangan usaha mikro, khususnya di daerah seperti Kabupaten Bojonegoro. Program ini memiliki hubungan erat dengan usaha mikro karena program ini berperan untuk mendukung pemberdayaan pedagang kecil melalui berbagai fasilitas, seperti

pelatihan kewirausahaan, pendampingan, akses permodalan tanpa jaminan, dan bunga ringan. Selain itu, program ini memudahkan pedagang mikro dalam pengurusan perizinan usaha dan sertifikasi produk, serta memberikan akses kemitraan yang lebih luas. KPP juga memberikan bantuan perbaikan sarana prasarana untuk meningkatkan iklim usaha, memungkinkan pengembangan usaha dan memperluas akses ke pembiayaan formal, yang semuanya penting untuk pertumbuhan usaha mikro (Danar et al., 2024).

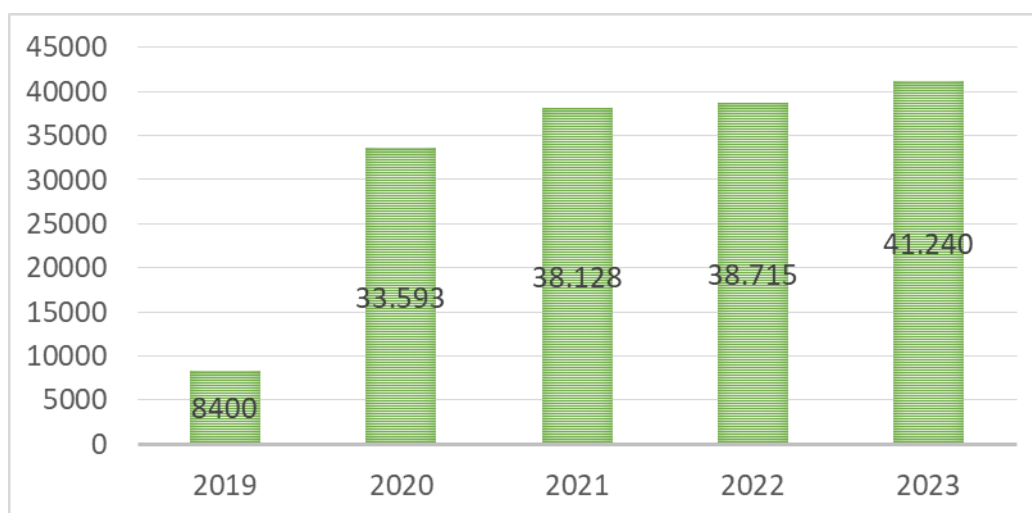
KPP difokuskan untuk mendukung usaha mikro dengan memberikan berbagai bantuan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Program ini menargetkan individu atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta dan hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta. Dengan tujuan untuk memberdayakan pedagang mikro, KPP menyediakan akses permodalan tanpa jaminan, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan sertifikasi produk. Fokus ini bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing, dan memperluas jaringan pasar bagi usaha mikro, yang sering kali terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya dan modal (Danar, 2024; Pemkab Bojonegoro, 2019).

Tabel 1. 2 Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Usaha Mikro
2019	69.544
2020	67.899
2021	70.524
2022	76.695
2023	81.251

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kab. Bojonegoro, 2023

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Gambar 1. 1 Jumlah Pengguna Kartu Pedagang Produktif

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kab. Bojonegoro, 2023

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pemilik Kartu Pedagang Produktif terdapat 8.400 KPP, pada tahun kedua 2020 terdapat 33.593 KPP, tahun ketiga 2021 terdapat 38.128, tahun 2022 terdapat 38.715 KPP, dan tahun 2023 terdapat 41.240 KPP. Setiap tahun pengguna Kartu Pedagang Produktif semakin bertambah, artinya program tersebut sudah tersalurkan kepada UMKM khususnya usaha mikro setiap tahunnya. Penyaluran program KPP terendah pada tahun 2019 karena pada tahun pertama hadirnya program Kartu Pedagang Produktif.

Dari kedua data diatas yaitu jumlah usaha mikro dan pemilik Kartu Pedagang Produktif sama-sama memiliki jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun dari data tersebut terdapat peningkatan setiap tahunnya, namun menimbulkan pertanyaan bagi peneliti karena sasaran utama Kartu Pedagang

Produktif yaitu usaha mikro. Namun jumlah usaha mikro dan pemilik Kartu Pedagang Produktif tidak *sinkron* setiap tahunnya. Hal tersebut membuat peneliti menimbulkan pertanyaan apakah efektif program yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro karena setiap tahunnya jumlah sasaran utama tidak *sinkron* dengan jumlah pemilik kartu pedagang produktif. Berikut tabel jumlah pelaku usaha mikro dengan jumlah kartu pedagang produktif pada tahun 2019-2023:

Tabel 1. 3 Jumlah Usaha Mikro dan Jumlah Kartu Pedagang Produktif

Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Kartu Pedagang Produktif
2019	69.544	8.400
2020	67.899	33.593
2021	70.524	38.128
2022	76.695	38.715
2023	81.251	41.240

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data diatas, meskipun jumlah UMKM khususnya usaha mikro dan pemilik kartu pedagang produktif di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Peneliti menemukan fakta lain berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan fakta bahwa adanya penyalahgunaan kredit, pelaku usaha mikro tidak menggunakan dan kredit untuk tujuan yang produktif. Para pelaku usaha mikro yang melakukan proses pengajuan pinjaman melalui program kartu pedangan produktif tidak semua hasil uang pinjaman dipergunakan untuk pengembangan usaha, tetapi dipergunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. sehingga tidak memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha. Dari fakta tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti keefektivan program Kartu Pedagang Produktif melalui kredit. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian ini

memiliki perbedaan mulai dari objek, subjek penelitian, metode penelitian, dan indikator penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nasrin, Ermawati, dan Uswatun Hasanah, (2019) yang berjudul “Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol” menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian efektivitas pengembangan UMKM telah berjalan dengan baik, dengan adanya bantuan tunai ataupun pinjaman modal usaha sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan penelitian Mulyani et al., 2024, pembiayaan Kredit di kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Usaha Rakyat (KUR) Syariah dari Pegadaian berpengaruh secara signifikan dalam membantu UMKM mengelola sumber daya keuangan dengan studi lapangan tanpa adanya proses manipulasi. Dengan celah tersebut, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya untuk mengukur Tingkat efektivitas suatu program menggunakan indikator efektivitas yang lebih lengkap.

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2023) yang berjudul “Efektivitas Program Berkadang (Berkarakter dan Berdaya Saing) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jombang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa program Berkadang (Berkarakter dan Berdaya Saing) menunjukkan sangat efisien dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat saran dari penulis bahwa bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu melakukan kajian yang lebih mendalam serta lebih luas mengenai efektivitas suatu program. Dalam celah tersebut, penelitian ini dapat dimanfaatkan penelitian selanjutnya dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif maka

penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Selain itu, dalam celah tersebut penelitian selanjutnya untuk mengukur efektivitas program menggunakan lima indikator.

Penelitian tentang efektivitas program bantuan pemerintah melalui kredit dalam pengembangan UMKM telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan fokus pada peningkatan akses modal, produktivitas, dan pertumbuhan usaha. Misalnya, penelitian dari Jaya (2017) dan Komarudin, et al (2024) mengkaji dampak kredit terhadap peningkatan kapasitas produksi dan penjualan UMKM. Studi lainnya seperti karya Sedyastuti (2018), serta Lubis dan Syahbudi (2022), menemukan bahwa bantuan kredit pemerintah berperan dalam membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing. Sementara itu, Sari, et al (2018) dan Susanto (2016) membahas bagaimana kredit ini mampu mengurangi angka kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor informal. Namun, terdapat juga penelitian yang menyoroti keterbatasan program, seperti rendahnya literasi keuangan penerima (Iqnatia, et al, 2021) dan masalah birokrasi dalam proses pencairan kredit (Mulyana, et al, 2020), yang menghambat optimalisasi bantuan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadinata, etl al (2023) juga menyoroti minimnya monitoring dan evaluasi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengukuran keberhasilan program jangka panjang bahkan persentase responden setuju untuk monitoring dan evaluasi dibawah 75% (Adiyadnya, et al. 2020).

Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi dampak bantuan kredit, celah yang belum banyak dieksplorasi adalah penggunaan indikator efektivitas yang lebih holistik. Sebagian besar penelitian hanya mengukur indikator sederhana seperti peningkatan omset dan jumlah tenaga kerja. Untuk itu,

penelitian lanjutan dapat mengembangkan model evaluasi yang lebih komprehensif dengan memasukkan indikator seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Namun, disisi lain peneliti juga melihat kesenjangan kurangnya keterlibatan atau kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat. Dari celah tersebut, peneliti selanjutnya mengambil penelitian yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat agar terdapat peningkatan akses yaitu Lembaga keuangan dapat memberikan dukungan finansial, sementara pemerintah dapat memastikan aksesibilitas bagi pelaku UMKM. Selain itu, agar menumbuhkan dukungan berkelanjutan yang artinya Keterlibatan masyarakat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen, yang penting untuk keberlanjutan program. Dengan hal tersebut, program berjalan lebih efektif dan efisien.

Untuk membuktikan keberhasilan upaya-upaya pemerintah dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini digunakan untuk memastikan keberhasilan pemberian bantuan modal melalui kredit berjalan secara efektif atau tidak efektif. Untuk menganalisis tingkat efektivitas, peneliti menggunakan lima indikator dari teori Campbell J.P yaitu Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap Program, Tingkat input dan Output, Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Efektivitas tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja suatu organisasi yang artinya sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber data yang tersedia.

Berdasarkan fakta dilapangan dan studi penelitain dahulu dari latar belakang mengenai keterkaitan antara pemberian modal melalui kredit dalam mendorong

pengembangan Usaha Mikro, maka peneliti memilih judul **“Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Melalui Kredit Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Penerima Bantuan Kredit KPP di Bojonegoro)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah, yaitu **“Bagaimana efektivitas program bantuan Pemerintah melalui kredit Dalam Upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini yaitu **“Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program bantuan Pemerintah melalui kredit dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro**

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan secara teoritis serta berguna untuk menambah wawasan ilmu khususnya mengenai efektivitas program bantuan Pemerintah melalui Kredit dalam upaya pengembangan UMKM.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian sebelumnya dan memberikan wawasan ilmu mengenai efektivitas program bantuan Pemerintah dalam upaya pengembangan UMKM.

b. Bagi lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan mampu menyempurnakan penelitian sebelumnya.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan referensi bagi pihak atau lembaga dalam menganalisis masalah yang sama dengan penulis.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi mengenai efektivitas program bantuan pemerintah melalui kredit dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro sehingga bermanfaat untuk pemantauan pelaksanaan program-program yang dihasilkan.